

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung yang terletak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi). Secara geografis Kota Metro terletak pada posisi 105,170-105,190 Bujur Timur dan 5,60-5,80 Lintang Selatan. Kota Metro berjarak 45 Km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Kota Metro memiliki luas wilayah 68,74 Km² atau 6.874 Ha, dengan jumlah penduduk 150.950 jiwa yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan (Metro Utara, Metro Timur, Metro Pusat, Metro Selatan, dan Metro Barat) serta 22 kelurahan. Nama Metro versi pertama berdasarkan sejarahnya berasal dari bahasa Belanda "Meterm" yang berarti "pusat" yang berarti antara Lampung Tengah dan Lampung Timur, bahkan di tengah provinsi Lampung nama metro berasal dari kata tersebut "Mitro" (Bahasa Jawa) yang artinya sahabat, rekan, golongan. Hal ini disebabkan adanya penjajahan yang datang dari berbagai daerah di luar Sumatera hingga mencapai Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro, menunjukkan bahwa nama Kota Metro merujuk pada versi pertama.

Saat ini Kota Metro sedang giat berbenah dan mengembangkan kota menuju visi dan misinya sebagai kota wisata edukasi dan keluarga di provinsi Lampung, meningkatkan sektor pendidikan, keamanan, kebersihan dan ruang publik, mengoptimalkan kawasan hijau dan mempercantik setiap sudut. Membangun taman di kota, sebagai cerminan dan representasi daerah, setiap daerah mempunyai semboyan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Begitu pula dengan semboyan kota metro adalah 'Bumi Sai Wawai' yang berarti negeri yang indah. Dengan semboyan tersebut, masyarakat Metro diharapkan terus berupaya mewujudkan Metro menjadi negara yang baik atau indah dan indah. Terdapat beberapa ikon kota metro yang menjadi spot favorit warga maupun pengunjung dari luar kawasan metro. Taman Merdeka, Masjid Taqwa dan Bendungan Raman merupakan ikon Kota Metro.

Menurut (Lampung Post, 2021) Realisasi pendapatan APBD Metro tahun anggaran 2020 mencapai Rp917,9 miliar atau 100,95% dari target sebesar Rp909,3 miliar. Sementara belanja sebesar Rp946,9 miliar sehingga defisit Rp28,9 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp221,6 miliar atau 111,14% dari target sebesar Rp199,4 miliar. Pendapatan transfer Rp677,8 miliar dan pendapatan wajib lainnya Rp28,9 miliar.

Menurut (Mabrur Aziz, 2022) Rapat paripurna tersebut dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Konstituen Frokopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli,

Pendamping, Pimpinan OPD dan Camat serta Kepala Desa se-Kota Metro. Sementara itu, rapat virtual juga dihadiri oleh Sekretaris OPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah. Anggota Badan Anggaran Wasis Riyadi saat memaparkan laporan Badan Anggaran menyebutkan, pada tahun 2021, pendapatan daerah melebihi 938 miliar dan belanja daerah melebihi 928 miliar. Sebab, pada 2021 surplus anggaran lebih dari 10 miliar. Sementara volume pembiayaan bersih daerah lebih dari 70 miliar, sehingga hingga tahun 2021 sisa dana anggaran lebih dari 80 miliar.

Menurut (Mabrur Aziz, 2022) Pendapatan daerah Kota Metro diproyeksikan tumbuh sebesar 9 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 5,7 miliar dan peningkatan pendapatan transfer sebesar 3,7 miliar. Hal itu diungkapkan Wali Kota Metro Wahdi saat memaparkan usulan perubahan APBD tahun anggaran 2022 di hadapan DPRD daerah, Selasa sore 6 September 2022. Secara spesifik Wahdi mengatakan, peningkatan pendapatan utama daerah tersebut disebabkan oleh kenaikan pajak daerah sebesar 4,1 miliar, kenaikan retribusi daerah sebesar 404 juta, peningkatan pendapatan utama daerah lain yang sah sebesar 1,83 miliar, dan penurunan pendapatan primer daerah sebesar 1,83 miliar. penghasilan. kekayaan 606 juta. Sementara itu, peningkatan pendapatan transfer disebabkan oleh peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar R3,7 miliar dan penurunan pendapatan transfer nasional sebesar R367,8 juta.

Menurut (Metro, 2023) Fraksi metro di DPRD Kota Metro menyoroti adanya peningkatan pendapatan sebesar Rp68,723 miliar pada rancangan APBD 2024. Pasalnya, peningkatan tersebut belum mencerminkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena masih bergantung pada pendapatan pusat dan pendapatan antar daerah. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro yang agendanya adalah sikap umum fraksi-fraksi dalam pemaparan rancangan peraturan daerah APBD Kota Metro Tahun 2024 "Kami informasikan kepada Metro melalui tim APBD Kota Metro." dewan kota (TAPD): "2024. Pendapatan RAPBD meningkat menjadi Rp971,037 miliar pada tahun 2023, meningkat Rp68,723 miliar atau 7,6 persen dibandingkan tahun 2023. Tahun anggaran Rp902,314 miliar," kata Juru Bicara Kelompok DPRD Kota Metro Deswani, Rabu (22/11/2023).

Namun, lanjut politikus NasDem itu, peningkatan tersebut belum mencerminkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masih bergantung pada transfer pusat dan antar daerah. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar BPPRD dan perangkat daerah terkait lebih meningkatkan PAD, termasuk optimalisasi dan rasionalisasi pajak, pengelolaan sampah, parkir, dan pajak penghasilan lainnya. Lanjut Deswan, Fraksi DPRD Kota Metro juga menyoroti kenaikan beban usaha sebesar Rp102,859 miliar atau 12,87 persen. Namun pertumbuhan tersebut justru meningkat karena kenaikan belanja pegawai

dan belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal mengalami penurunan dari Rp108,277 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp79,991 miliar pada tahun 2024,” jelasnya di bagian lain seraya menambahkan, Rombongan DPRD Kota Metro juga meminta Dinas Perumahan dan Permukiman PUTR (Perkim) memperbaiki pelaksanaannya. Dari kegiatan olahraga tahun 2024, sehingga sebagian besar pelatihan harus dimulai pada triwulan I tahun 2024. “Hal ini tidak hanya menjamin antisipasi musim hujan di penghujung tahun, tapi juga memastikan masyarakat bisa merasakan manfaatnya lebih awal,” jelas Deswan.

Menurut (Metro, 2024) untuk memperkuat komitmen digitalisasi transaksi guna mewujudkan Metro menjadi cashless society, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Bangkit Haryo Utomo turut aktif dalam Forum Group Discussion (FGD) dan tim peningkatan kapasitas untuk mempercepat dan memperluas kegiatan daerah. Digitalisasi (TP2DD) dilaksanakan di Hotel Aidia Grande pada Selasa (27/02/2024) dihadiri oleh BPPRD dan pimpinan Bapenda daerah/kota se-Provinsi Lampung.

Lanjutnya, penerapan ETPD diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Primer Daerah (PAD). Sekda menambahkan, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat kita optimalkan secara penuh dan mandiri, Retribusi Daerah memiliki peluang yang sangat baik untuk pengembangan kepemimpinan dan harus berpedoman pada mentalitas “birokrasi wirausaha”.

Meski Pemerintah daerah tetap berpegang pada prinsip pelayanan publik dalam operasionalnya, dimana dukungan anggaran tetap dioptimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik. “Selama ini banyak hal yang terabaikan dalam pengelolaan retribusi daerah. Pertama, untuk menunjang operasional pelayanan yang sering diabaikan oleh pengelola OPD. Oleh karena itu, infrastruktur pelayanan tidak dalam kondisi baik. anggaran pemeliharaan yang sangat kecil menyebabkan biaya operasional tidak dapat ditutupi oleh penerimaan pembayaran yang mungkin dilakukan. “Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita tutup mata,” ujarnya. Kedua, peningkatan kapasitas peralatan manajemen sangat kecil dan biasanya tidak ada. Jelas bahwa layanan pembayaran daerah berkontribusi terhadap pendapatan benih daerah. Sistem pembayaran elektronik daerah diharapkan dapat mendorong pengelolaan pembayaran yang profesional. Tidak hanya untuk transaksi yang lebih bertanggung jawab, tetapi juga untuk sistem pelayanan yang baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melly Pitria Indriani dkk (2023) yang membahas pendapatan asli daerah dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten brebes (studi empiris pada pemerintah kabupaten

periode 2018-2022). Riset ini menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten brebes 2018-2022. Selanjutnya penelitian yang membahas keterkaitan antara pendapatan asli daerah (PAD) kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA) terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia periode 2015-2019 telah dilakukan oleh Danil Sanjaya dan Herlina (2021). Riset ini menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Ikhyannuddin dkk (2022) yang membahas pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi aceh tahun 2016-2020 , Riset ini menemukan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Berbeda dengan penelitian yang membahas keterkaitan antara pendapatan asli daerah (PAD) kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran(SILPA) terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi provinsi se-Indonesia periode 2015-2019 telah dilakukan oleh Danil Sanjaya dan Herlina (2021). Riset ini menemukan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-indonesia 2015-2019. Kemudian penelitian Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022) yang membahas pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2016-2021. Riset ini menemukan belanja modal berpengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022) pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi sumatera barat 2016-2021. Riset ini menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah provinsi lampung dengan judul skripsi : “ **Analisis Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Modal Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Metro**“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Bagaimana pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro?

2. Bagaimana kekayaan daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro?
3. Bagaimana belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah: diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota metro.
2. Bagi Penulis: diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota metro.
3. Bagi Dunia Pendidikan: diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, kekayaan daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian pemerintah kota metro. Dan melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berminat pada bidang peneliti

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membuat penelitian terfokus serta tidak melebar dari penelitian yang dimaksudkan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian menjadi berikut:

1. Luas lingkup hanya laporan meliputi laporan keuangan daerah. Laporan yang diambil melalui dinas badan pengelola keuangan dan asset daerah kota metro dan dinas pengelola pajak dan retribusi daerah kota metro 2020-2023.
2. Laporan yang dipakai hanya laporan keuangan periode 2020-2023 yang telah diaudit.